

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok telah dapat melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2019 sesuai rencana, serta menyusun laporan pelaksanaan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dalam memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok).

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2019 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan Visi - Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dan Visi - Misi Pemerintah Kabupaten Solok.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2019 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengevaluasi capaian dan efektifitas program dan kegiatan yang dilakukan serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Arosuka, Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP  
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SOLOK

**Drh. KENEDY HAMZAH, M.Si**

Nip. 19650727 199202 1 002

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                   | 1  |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....                               | 3  |
| <b>BAB I</b> .....  | 4  |
| 1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .....                      | 5  |
| 1.2.2 Struktur Organisasi.....                                | 6  |
| 1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi ..... | 8  |
| <b>BAB II</b> .....   | 9  |
| 2.1. Perencanaan Strategis Organisasi.....                    | 9  |
| 2.2. Perjanjian Kinerja.....                                  | 10 |
| <b>BAB III</b> .....  | 12 |
| <b>3.1. Capaian Kinerja Organisasi</b> .....                  | 12 |
| <b>3.2 Realisasi Anggaran</b> .....                           | 26 |
| <b>PENUTUP</b> .....  | 28 |
| <b>4.1. Kesimpulan</b> .....                                  | 28 |
| <b>4.2. Saran</b> .....                                       | 28 |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil, perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2019, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2019, wajib menyusun LkjIP setiap akhir tahunnya. Selain itu, informasi dalam dokumen LKJIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas yang telah diberikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan unsur pendukung yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok melaksanakan 8 (delapan) program dengan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.574.594.800 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perjanjian Kinerja.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019.

## 1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

### 1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok (sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah) merupakan unsur pendukung Bupati di bidang penanaman modal, tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumberdaya mineral;

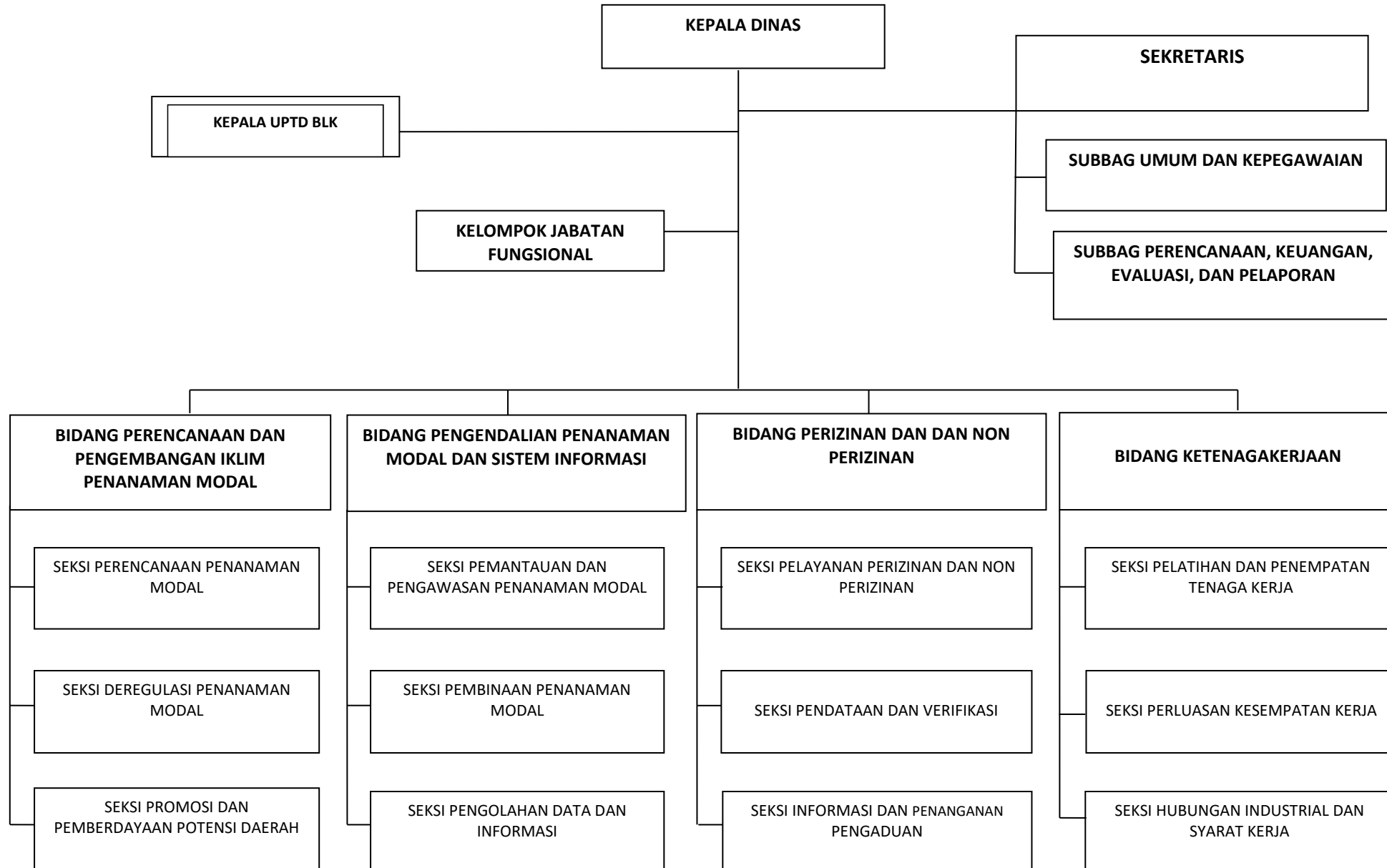
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumberdaya mineral ;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1.2.2 Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang terdiri dari :

1. Kepala.
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
  - b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah; dan
  - c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Potensi Daerah.
4. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
  - b. Seksi Pembinaan Penanaman Modal; dan
  - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
5. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - b. Seksi Pendataan dan Verifikasi; dan
  - c. Seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan
6. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari:
  - a. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
  - c. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut gambar struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok:



### 1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok , yaitu :

- a. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan penanaman modal yang efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis data yang valid. Saat ini baru 39 dari 92 izin yang dapat diakses dengan menggunakan aplikasi online SICANTIK;
- b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan;
- c. Masih rendahnya daya saing tenaga kerja dan minusnya kemampuan penduduk usia produktif dalam menciptakan usaha sendiri;
- d. Kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat mengganggu produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan berusaha.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### 2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2016–2021) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis.

Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya pelayanan perizinan yang baik meliputi mudah, murah, transparan dan akuntabel. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan kualitas yang baik dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal di lingkungan Kabupaten Solok serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan iklim investasi serta meningkatkan kualitas tenaga kerja agar dapat berdaya saing di dunia kerja.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya nilai investasi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan;
3. Meningkatnya kesempatan kerja;
4. Meningkatnya penempatan tenaga kerja.

Sasaran strategis tersebut memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap sebagaimana terlampir. Tiga dari Empat indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok merupakan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program.

Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok, disusun mengacu pada Renstra dengan mengambil target tahun 2019.

Berikut matriks Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja 2016-2021:

| No | Tujuan                               | Sasaran                              | Indikator Tujuan/Sasaran                    | Target 2019 |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| 1  | 2                                    | 3                                    | 4   | 5           |
| 1  | <b>Meningkatkan investasi</b>        | Meningkatnya nilai investasi         | Nilai Investasi thn n (dalam milyar rupiah) | 208.37      |
|    |                                      | Meningkatnya kualitas pelayanan      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)            | 3.5         |
| 2  | <b>Menurunkan angka pengangguran</b> | Meningkatnya kesempatan kerja        | Persentase pencari kerja yang terlatih      | 12          |
|    |                                      | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Persentase penempatan tenaga kerja          | 7           |

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**

| No | Sasaran Strategis                    | Indikator Kinerja                      | Target |
|----|--------------------------------------|--|--------|
| 1. | Meningkatnya nilai investasi         | Nilai Investasi (dalam milyar rupiah)  | 208,37 |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)       | 3.5    |
| 3. | Meningkatnya kesempatan kerja        | Persentase pencari kerja yang terlatih | 12     |
| 4. | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Persentase penempatan tenaga kerja     | 7      |

| Program   | Anggaran                   |
|---|----------------------------|
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Rp. 445.699.800,-          |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Rp. 240.715.000,-          |
| 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 58.720.000,-           |
| 4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja                    | Rp. 96.540.000,-           |
| 5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja   | Rp. 275.050.000,-          |
| 6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                            | Rp. 180.615.000,-          |
| 7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi                    | Rp. 239.080.000,-          |
| 8. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum                                | Rp. 38.175.000,-           |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp. 1.574.594.800,-</b> |

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kesimpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran sbb :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Kabupaten Solok sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran

| No.                          | Tujuan                               | Sasaran                              | Indikator Tujuan/Sasaran                    | Target 2019 | Realisasi 2019 | % Capaian |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|----------------|-----------|
| 1                            | 2                                    | 3                                    | 4   | 5           |                |           |
| 1                            | <b>Meningkatkan investasi</b>        | Meningkatnya nilai investasi         | Nilai Investasi thn n (dalam milyar rupiah) | 208,37      | 180,30         | 86.53     |
|                              |                                      | Meningkatnya kualitas pelayanan      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)            | 3.5         | 3.59           | 102.57    |
| 2                            | <b>Menurunkan angka pengangguran</b> | Meningkatnya kesempatan kerja        | Persentase pencari kerja yang terlatih      | 12          | 40.91          | 340       |
|                              |                                      | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Persentase penempatan tenaga kerja          | 7           | 11.43          | 163       |
| <b>Rata-Rata Capaian (%)</b> |                                      |                                      |   |             |                | 173.525   |

## SASARAN 1. MENINGKATNYA NILAI INVESTASI

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Nilai Investasi dengan indikator kinerja Nilai Investasi thn n (dalam milyar rupiah):

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

| Sasaran                      | Indikator Kinerja                           | Satuan | Target 2019 | Realisasi 2019 | Capaian Kinerja           | Target Akhir 2021 |
|------------------------------|---|--------|-------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| Meningkatnya Nilai Investasi | Nilai Investasi thn n (dalam milyar rupiah) | Nilai  | 208,37      | 180,30         | 86.53 %<br>Tidak Tercapai | 229.73            |

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir

| Indikator Kinerja       | Satuan                      | Target |        |        | Realisasi |        |       | % Capaian Kinerja |       |       | Target Akhir 2021 | % Capaian Renstra |
|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------------------|
|                         |                             | 2017   | 2018   | 2019   | 2017      | 2018   | 2019  | 2017              | 2018  | 2019  |                   |                   |
| Nilai Investasi tahun n | Nilai (Dalam Milyar Rupiah) | 189    | 198.45 | 208.37 | 189.29    | 176.85 | 180.3 | 100,15            | 89.12 | 86.53 | 229.73            | 81.4              |

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi nilai investasi beberapa tahun terakhir

| No | Uraian    | Realisasi (Dalam Milyar Rupiah) |        |        |        |
|----|-----------|---------------------------------|--------|--------|--------|
|    |           | 2016                            | 2017   | 2018   | 2019   |
| 1  | Target    | 180,0                           | 189,0  | 198,45 | 208,37 |
| 2  | Realisasi | 254,91                          | 189,29 | 176,85 | 180,3  |

Melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Solok berfluktuatif, realisasi pada tahun 2019 sesungguhnya telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.45 Milyar Rupiah tapi dikarenakan target investasi juga meningkat maka realisasi investasi tahun 2019 hanya mencapai 86.53% (180.3 dari target 208.37M).

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi nilai investasi dengan nasional dan provinsi tahun 2019

| Tahun | Realisasi (Dalam Milyar Rupiah) |                 |          |
|-------|---------------------------------|-----------------|----------|
|       | Kab Solok                       | Provinsi Sumbar | Nasional |
| 2019  | 180,3                           | 5.383           | 809.600  |

Realisasi Investasi Nasional mencapai 809.6 Trilyun Rupiah atau sebesar 102.2% dari target 792 Trilyun Rupiah, untuk realisasi investasi provinsi Sumatera Barat mencapai 5.3 Trilyun Rupiah dari target 4.3 Trilyun Rupiah yang ditetapkan. Sementara Kabupaten Solok hanya sanggup mencapai realisasi investasi sebesar 180.3 Milyar Rupiah.

Permasalahan yang ditemui dalam mencapai target sasaran meningkatnya nilai investasi, antara lain:

- Kesulitan untuk memperoleh lahan usaha dan kepastian status kepemilikan lahan yang dimohon pelaku usaha, serta peruntukan yang tidak sesuai dengan RTRW;
- Tidak akuratnya data potensi peluang Investasi yang disampaikan SKPD terkait, potensi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha;
- Kurangnya Sarana Promosi dan Kegiatan untuk mengikuti Expo-expo keluar daerah sehingga terbatasnya kemampuan untuk memperkenalkan potensi peluang Investasi pada kalangan luar;
- Proses dan persyaratan yang tidak memihak kepada calon Investor (Regulasi, Birokrasi yang kurang Efisien, perbedaan persepsi antara pusat dan daerah);
- Jaminan kapasitas hukum, iklim usaha yang kondusif dan keamanan berusaha yang belum diperoleh para calon Investor;
- Kurang optimalnya Sosialisasi terhadap pemanfaatan potensi Investasi.

Adapun alternative solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi adalah:

- Membuat peta RUPM yang merupakan Gambaran umum potensi peluang Investasi;
- Melakukan Konsolidasi maupun Sosialisasi antara pemerintah dengan dunia usaha dengan melibatkan dan mengikutsertakan stakeholder pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanaman Modal;
- Mencetak Leaflet, Brosur, bukti tentang potensi peluang Investasi di kabupaten solok dengan tujuan sebagai media promosi memperkenalkan potensi kepada calon Investor;
- Koordinasi dengan SKPD terkait untuk melengkapi/kesempurnaan data potensi peluang Investasi sesuai sektor masing-masing.

Berikut pegawai yang melaksanakan urusan penanaman modal guna mendukung sasaran meningkatnya nilai investasi:

Tabel 3.6 Pegawai yang melaksanakan urusan penanaman modal

| No. | Nama                     | Jabatan  | Pangkat/Gol         | Ket |
|-----|--------------------------|--|---------------------|-----|
| 1   | Hendra Suherman, S.sos   | Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM    | Pembina/ IV.a       |     |
| 2   |                          | Kabid Pengendalian PM dan Sist.Informasi       |                     |     |
| 3   | Nurhasti Yenni, SH       | Kasi Perencanaan Penanaman Modal               | Penata Tk. I/ III.d |     |
| 4   | Refif Syofra, SE,MM      | Kasi Deregulasi Penanaman Modal                | Penata/III.c        |     |
| 5   | Roza Yulanda Syahril, SE | Kasi Promosi dan Pemberdayaan Potensi Daerah   | Penata/III.c        |     |
| 6   | Aria Witra, S.Pd,MM      | Kasi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal | Pembina/IV.a        |     |
| 7   | Afni Novita, SE          | Kasi Pembinaan Penanaman Modal                 | Penata/III.c        |     |
| 8   | Rosmawita, BA            | Kasi Pengolahan Data dan Informasi             | Penata Tk. I/III.d  |     |

Jabatan struktural yang mengurus bidang penanaman modal berjumlah 8 (delapan) dengan 1 (satu) jabatan yang masih kosong yaitu kabid Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dikarenakan pejabat tersebut wafat pada bulan November 2018 dan belum diisi sampai Desember 2019. Para Pejabat tersebut hanya dibantu oleh 4 (empat) orang Tenaga Harian Lepas, 2 (dua) orang di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan 2 (dua) orang di bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi.

Tabel 3.7 Sarana Prasarana Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal

| No       | Jenis Sarana Dan Prasarana | Jumlah   | Kondisi  |             |             | Kondisi Kelengkapan (Lengkap Kurang, Mencukupi Atau Lainnya) |
|----------|----------------------------|----------|----------|-------------|-------------|--|
|          |                            |          | Baik     | Kurang Baik | Rusak Berat |  |
| <i>1</i> | <i>2</i>                   | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i>    | <i>6</i>    | <i>7</i>   |
| 1        | Lemari Kayu                | 1        | 1        |             |             | Kurang   |
| 2        | Kursi Putar                | 7        | 7        |             |             | Kurang   |
| 3        | Meja Kerja                 | 2        | 2        |             |             | Kurang   |
| 4        | Komputer                   | 3        | 3        |             |             | Mencukupi  |
| 5        | Kursi Rapat                | 20       | 20       |             |             | Kurang   |
| 6        | Printer                    | 2        | 2        |             |             | Kurang   |
| 7        | Televisi                   | 1        | 1        |             |             | Mencukupi  |
| 8        | Laptop                     | 1        | 1        |             |             | Kurang   |

Sumber : DPMP TSP Naker Per Desember 2019



Tabel 3.8 Program dan kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya nilai investasi

| <b>Indikator Kinerja</b> | <b>Program/kegiatan</b>  | <b>Anggaran</b>    | <b>Realisasi</b>   | <b>%</b>     |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Nilai Investasi          | <b>Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi</b>   | <b>180.615.000</b> | <b>180.244.350</b> | <b>99.79</b> |
|                          | Keg. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | 121.255.000        | 121.093.550        | 99,87        |
|                          | Keg. Pemantauan , pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal   | 59.360.000         | 59.150.800         | 99,65        |

Hanya 1 program dan 2 kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya nilai investasi dengan total anggaran Rp 180.615.000,- dengan realisasi Rp 180.244.350,- atau sebesar 99.79%.

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk peningkatan nilai investasi:

- Melengkapi data potensi peluang Investasi sesuai sektor dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait sesuai yang dibutuhkan dunia usaha;
- Penciptaan birokrasi yang efisien, jaminan kepastian hukum bidang Penanaman Modal;
- Menciptakan Iklim usaha yang kondusif serta kemudahan berusaha bagi calon Investor;
- Memberikan kemudahan Perizinan, dengan pemberian insentif dsbnya dengan tujuan untuk menarik Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Solok;
- Pengembangan potensi daerah melalui strategi promosi yang inovatif dengan mengikuti promosi Investasi dan potensi daerah melalui expo dan even-even yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta;
- Membuat Website promosi potensi peluang Investasi yang dapat diakses melalui media sosial;
- Mengoptimalkan Sosialisasi terhadap pemanfaatan Lokasi Investasi kepada pemilik lahan, tokoh masyarakat setempat dengan melibatkan stakeholders pemangku kepentingan.

## SASARAN 2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

| Sasaran                         | Indikator Kinerja                | Satuan | Target 2019 | Realisasi 2019 | Capaian Kinerja             | Target Akhir 2021 |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 3,5         | 3.59           | 102.57 %<br>Melebihi target | 3,7               |

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir

| Indikator Kinerja          | Satuan | Target |      |      | Realisasi |      |      | % Capaian Kinerja |        |        | Target Akhir 2021 | % Capaian Renstra |
|----------------------------|--------|--------|------|------|-----------|------|------|-------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|
|                            |        | 2017   | 2018 | 2019 | 2017      | 2018 | 2019 | 2017              | 2018   | 2019   |                   |                   |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 3.3    | 3.4  | 3.5  | 3.5       | 3.46 | 3.59 | 106.06            | 101.77 | 102.57 | 3,7               | 97                |

Dengan telah dilakukannya penilaian IKM di DPMPTSPNaker, dapat diketahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSPNAKER terutama dalam pemberian perizinan. Penilaian IKM yang ada digunakan sebagai bahan evaluasi bagi DPMPTSPNAKER guna lebih meningkatkan standar dan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk tahun 2019, hasil survei terhadap kepuasan masyarakat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.11 Perbandingan IKM dengan provinsi tahun 2019

| Indikator | Realisasi (Indeks) |                 |
|-----------|--------------------|-----------------|
|           | Kab Solok          | Provinsi Sumbar |
| IKM       | 3.59               | 3.27            |

Jika dibandingkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Barat, IKM di Kabupaten Solok lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Sumatera Barat.

Keberhasilan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dikarenakan:

- Meningkatkan mutu pelayanan yang ada, mulai dari sarana dan prasarana serta mengotimalkan SDM yang ada.
- Adanya aplikasi pelayanan perizinan membuat pelayanan menjadi lebih optimal
- Fasilitas gedung yang semakin baik menambah pelayanan yang ada.

Indeks Kepuasan Masyarakat dinilai dengan cara melakukan survei terhadap 244 responden dengan hasil indeks 3.59 atau 89.74% (terlampir).

Adapun alternative solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

- Meningkatkan pelayanan perizinan melalui sistim Elektronik;
- Memberikan kemudahan birokrasi perizinan yang efisien;
- Peningkatan penyediaan sarana penunjang pelayanan publik seperti: komputer, display informasi, ruang menyusui dan ruang bermain anak yang lebih representatif;
- Ruang kerja pengolahan data dan dokumen yang lebih representatif;
- Penambahan petugas pelayanan dan pemrosesan perizinan.

Berikut pegawai yang melaksanakan urusan bidang perizinan guna mendukung capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat:

Tabel 3.12 Pegawai yang melaksanakan urusan bidang perizinan

| No | Nama              | Jabatan                                    | Pangkat/Gol            | Ket |
|----|-------------------|--|------------------------|-----|
| 1  | Mawardi, S.Pd, MM | Kabid Perizinan dan Non Perizinan          | Pembina/ IV.a          |     |
| 2  | Eka Trisna, SS    | Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Penata TkI/ III.d      |     |
| 3  | M.Gafur           | Kasi Informasi dan Penanganan Pengaduan    | Penata/III.c           |     |
| 4  | Firdaus, S.Pd     | Kasi Pendataan dan Verifikasi              | Pembina/IV.a           |     |
| 5  | Helvi Yuliati, SH | FU   | Penata Muda Tk 1/III.b |     |
| 6  | Masriwal, SE      | FU   | Penata/III.c           |     |
| 7  | Apri              | FU   | Pengatur Tk.1/II.d     |     |
| 8  | Marlaini, S.Pd,MM | FU   | Pembina/IV.a           |     |

Jabatan struktural yang mengurus bidang perizinan berjumlah 4 (empat) jabatan yang dipimpin Kabid Perizinan dan Non Perizinan. Para Pejabat tersebut dibantu oleh 4 (empat) orang PNS untuk di back office dan administrasi dan 6 (enam) orang Tenaga Harian Lepas untuk petugas Front Office pelayanan perizinan.

Tabel 3.13 Sarana Prasarana Penyelenggaraan Bidang Perizinan

| No | Jenis Sarana Dan Prasarana | Jumlah | Kondisi |             |             | Kondisi Kelengkapan (Lengkap Kurang, Mencukupi Atau Lainnya) |
|----|----------------------------|--------|---------|-------------|-------------|--|
|    |                            |        | Baik    | Kurang Baik | Rusak Berat |  |
| 1  | 2                          | 3      | 4       | 5           | 6           | 7  |
| 1  | Lemari Kaca                | 4      | 4       |             |             | Mencukupi  |
| 2  | Lemari Kayu                | 1      | 1       |             |             | Mencukupi  |
| 2  | Kursi Putar                | 12     | 12      |             |             | Kurang   |
| 3  | Meja Receptionist          | 4      | 4       |             |             | Kurang   |
| 4  | Komputer                   | 4      | 4       |             |             | Kurang   |
| 5  | Kursi Rapat                | 20     | 20      |             |             | Kurang   |
| 6  | Bangku Tunggu              | 4      | 4       |             |             | Kurang   |
| 7  | Televisi                   | 1      | 1       |             |             | Mencukupi  |
| 8  | Maket                      | 7      | 7       |             |             | Mencukupi  |

Ada 3 (tiga) program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14 Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran 2

| Indikator Kinerja                | Program/kegiatan   | Anggaran           | Realisasi          | %            |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | <b>Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>                   | <b>239.080.000</b> | <b>237.483.410</b> | <b>99,33</b> |
|                                  | Kegiatan Penyederhanaan Prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal | 239.080.000        | 237.483.410        | 99,33        |
|                                  | <b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum</b>                               | <b>38.175.000</b>  | <b>38.148.000</b>  | <b>99,93</b> |
|                                  | Peningkatan Standar Mutu Manajemen   | 38.175.000         | 38.148.000         | 99,93        |

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):

- Memberikan kemudahan Perizinan;
- Mengoptimalkan Sosialisasi tentang pelayanan perizinan online;
- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

### SASARAN 3. MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan indikator kinerja Persentase Pencari Kerja Terlatih:

Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja Sasaran 3

| Sasaran                       | Indikator Kinerja             | Satuan | Target 2019 | Realisasi 2019 | Capaian Kinerja | Target 2021 |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| Meningkatnya Kesempatan Kerja | % Pencari kerja yang terlatih | %      | 12          | 41.77          | 340%            | 16          |

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir

| Indikator Kinerja             | Sat | Target |      |      | Realisasi |      |       | % Capaian Kinerja |      |      | Target Akhir 2021 | % Capaian Renstra |
|-------------------------------|-----|--------|------|------|-----------|------|-------|-------------------|------|------|-------------------|-------------------|
|                               |     | 2017   | 2018 | 2019 | 2017      | 2018 | 2019  | 2017              | 2018 | 2019 |                   |                   |
| % Pencari kerja yang terlatih | %   | 8      | 10   | 12   | 11        | 20   | 41.77 | 122               | 200  | 340  | 16                | 256               |

Realisasi indikator Kinerja persentase pencari kerja yang terlatih melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan:

1. Tahun 2019 jumlah paket pelatihan yang dibiayai APBN meningkat dari tahun sebelumnya dari 32 menjadi 39 paket sehingga dapat menampung lebih banyak siswa/pencari kerja.
2. Kerjasama dengan BBPLK Bekasi dimana sebanyak 14 orang pemuda Kabupaten Solok mengikuti pelatihan disana.

Tabel 3.17 Perbandingan Persentase Pencari Kerja yang terlatih Kab Solok dan Propinsi Sumatera Barat

| Uraian                         | Kab Solok | Prop Sumbar | Ket  |
|--------------------------------|-----------|-------------|--|
| Jumlah Pencari Kerja Terlatih  | 680       | 83.042      | Rumus: $\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja Terlatih} \times 100\%}{\text{Jumlah Pencari Kerja Terdaftar}}$ |
| Jumlah Pencari Kerja Terdaftar | 1.628     | 124.754     |  |
| % Pencari Kerja Terlatih       | 41.77     | 66.56       |  |

Jika dibandingkan persentase pencari kerja yang terlatih di propinsi lebih tinggi dibandingkan di kabupaten Solok dikarenakan Provinsi banyak melakukan kerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) dan Balai Latihan Kerja di luar Sumatera Barat. Hal ini juga tengah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok untuk menjalin kerjasama dengan BBPLK dan BLK se Indonesia. Tahun 2019, sebanyak 14 orang pemuda Kabupaten Solok telah mengikuti pelatihan di BBPLK Bekasi dan diharapkan di tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak lagi pemuda/pemudi dari Kabupaten Solok mengikuti pelatihan-pelatihan di BBPLK maupun BLK di seluruh Indonesia.

Berikut pegawai yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 3:

Tabel 3.18 Pegawai yang mendukung pencapaian kinerja sasaran persentase pencari kerja terlatih

| No. | Nama                | Jabatan              | Pangkat/Gol            | Ket |
|-----|---------------------|----------------------|------------------------|-----|
| 1   | Zulfakhri, S.Sos    | Kepala UPTD BLK      | Penata Tk. I/III.d     |     |
| 2   | Umillaila, A.Md     | Kasubbag TU BLK      | Penata Muda/ III.a     |     |
| 3   | Irwan, S.Sos        | Instruktur Madya     | Pembina/IV a           |     |
| 4   | Rizal Khairal, S.Pd | Instruktur Madya     | Pembina/IV a           |     |
| 5   | Edvi Junaidi, ST    | Instruktur Madya     | Pembina/IV a           |     |
| 6   | Nola Zuhana, M.Kom  | Instruktur Madya     | Penata Tk 1/III.d      |     |
| 7   | Astrijon Effendi    | Instruktur Penyelia  | Penata Tk 1/III.d      |     |
| 8   | Ari Safbendri, ST   | Instruktur Pertama   | Penata/III c           |     |
| 9   | Ria Saputra, A.Md   | Instruktur Pelaksana | Pengatur Tk 1/II d     |     |
| 10  | Umi Qoriah, A.Md    | Instruktur Pelaksana | Pengatur Tk 1/II d     |     |
| 11  | Mulyawarni, S.Pd    | Fungsional Umum      | Penata Muda Tk 1/III.b |     |
| 12  | Markidah            | Fungsional Umum      | Penata Muda Tk 1/III.b |     |
| 13  | Nilasari, A.Md      | Fungsional Umum      | Pengatur Tk 1/II d     |     |
| 14  | Damanhuri           | Fungsional Umum      | Pengatur MudaTk 1/II b |     |
| 15  | Edison              | Fungsional Umum      | Pengatur Tk 1/II d     |     |

Sasaran Persentase pencari kerja terlatih ini merupakan pencapaian kinerja Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten Solok. BLK dikepalai Kepala UPTD yang dibantu Kasubbag Tata Usaha dan 5 Staf PNS serta 3 THL serta 8 (delapan) orang instruktur.

Berikut Sarana dan Prasarana yang ada di UPTD BLK:

Tabel 3.19 Sarana dan Prasarana UPTD BLK

| Jenis  | Luas (m <sup>2</sup> ) | Kondisi     | Tahun Perolehan |
|--|------------------------|-------------|-----------------|
| Tanah di Komplek Perkantoran, Asrama, Worksho dan Perumahan Dinas di Lubuk Selasih | 20.480                 |             | 1980            |
| Gedung Kantor UPTD   | 84                     | Kurang Baik |                 |
| Garace   | 137                    | Kurang Baik | 1987            |
| Gudang Tertutup  | 77                     | Kurang Baik | 1981            |
| Workshop Elektro   | 63                     | Kurang Baik | 1981            |
| Workshop Listrik   | 35                     | Kurang Baik | 1981            |
| Workshop Automotive  | 105                    | Kurang Baik | 1981            |
| Workshop Bangunan  | 144                    | Kurang Baik | 1981            |
| Ruang menjahit   | 63                     | Kurang Baik | 1981            |

|                                      |       |             |      |
|--------------------------------------|-------|-------------|------|
| Gedung Labor /Belajar                | 70    | Kurang Baik | 1987 |
| Gedung Aula                          | 176   | Kurang Baik | 1981 |
| Gedung Teori/Belajar                 | 126   | Kurang Baik | 1981 |
| Mushalla                             | 48    | Kurang Baik | 1987 |
| Rumah Jaga                           | 9     | Kurang Baik | 1987 |
| 5 (lima) unit Rumah Dinas type 70    | 350   | Kurang Baik | 1983 |
| Rumah Dinas type 50 sebanyak 30 unit | 1.500 | Kurang Baik | 1983 |
| Asrama                               | 500   | Kurang Baik | 1987 |
| Ruang Komputer                       | 88    | Kurang Baik | 1987 |
| Ruang Serba Guna                     | 90    | Kurang Baik | 1987 |
| Ruang Komputer On-Line               | 60    | Kurang Baik | 2007 |

Ada 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang mendukung sasaran Persentase pencari kerja terlatih seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20 Program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3

| No | Indikator Kinerja             | Program/kegiatan  | Anggaran   | Realisasi  | %     |
|----|-------------------------------|---|------------|------------|-------|
| 1  | % Pencari Kerja yang terlatih | Program peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 96.540.000 | 95.765.910 | 99,20 |
|    |                               | Keg. Pemeliharaan R/B sarana dan prasarana BLK              | 96.540.000 | 95.765.910 | 99,20 |

Adapun Rencana Tingkat Lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan persentase pencari kerja terlatih, antara lain:

- Peningkatan sarana prasarana/SDM BLK;
- Peningkatan kompetensi siswa yang dilatih di BLK;
- Penambahan SDM fungsional instruktur di BLK;
- Meningkatkan kerjasama dengan BBPLK dan BLK di luar Kabupaten Solok agar lebih banyak pemuda/pemudi kabupaten Solok yang dapat mengikuti pelatihan.

#### SASARAN 4. MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Persentase Penempatan Tenaga Kerja:

Tabel 3.21 Pencapaian Kinerja Sasaran 4

| Sasaran                              | Indikator Kinerja         | Satuan | Target 2019 | Realisasi 2019 | Capaian Kinerja | Target 2021 |
|--------------------------------------|---------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja | % Penempatan tenaga kerja | %      | 7           | 11.43          | 163%            | 9           |

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir

| Indikator Kinerja         | Sat | Target |      |      | Realisasi |      |       | % Capaian Kinerja |      |      | Target Akhir 2021 | % Capaian Renstra |
|---------------------------|-----|--------|------|------|-----------|------|-------|-------------------|------|------|-------------------|-------------------|
|                           |     | 2017   | 2018 | 2019 | 2017      | 2018 | 2019  | 2017              | 2018 | 2019 |                   |                   |
| % Penempatan tenaga kerja | %   | 5      | 6    | 7    | 9.92      | 4.14 | 11.43 | 198.4             | 69   | 163  | 9                 | 127               |

Penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja:

- Terbukanya peluang dan kesempatan kerja saat Job Fair
- Tersebarnya informasi lowongan kerja yang terakses oleh pencari kerja baik melalui mobil pelayanan keliling maupun media informasi lainnya.

Tabel 3.23 Perbandingan Persentase Penempatan Tenaga Kerja Kab Solok dan Propinsi Sumatera Barat

| Uraian                         | Kab Solok | Prop Sumbar | Ket  |
|--------------------------------|-----------|-------------|--|
| Jumlah Penempatan Tenaga Kerja | 186       | 26.880      | Rumus: $\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja Yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja Terdaftar}} \times 100\%$ |
| Jumlah Pencari Kerja Terdaftar | 1.628     | 124.754     |  |
| % Penempatan Tenaga Kerja      | 11.43     | 21.55       |  |

Dilihat tabel diatas, persentase penempatan di Kabupaten Solok masih dibawah persentase penempatan Provinsi Sumatera Barat. Untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Solok kedepan harus menambah jumlah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Barat.



Berikut pegawai yang melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan guna mendukung capaian sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja:

Tabel 3.24 Pegawai yang melaksanakan urusan bidang Tenaga Kerja

| No. | Nama                      | Jabatan                                    | Pangkat/Gol        | Ket |
|-----|---------------------------|--|--------------------|-----|
| 1   | Ratna Juita, S.Sos        | Kabid Ketenagakerjaan                      | Penata Tk. I/III.d |     |
| 2   |                           | Kasi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja |                    |     |
| 3   | Fitria Fenti, S.Si, M.Cio | Kasi Perluasan Kesempatan Kerja            | Penata/III.c       |     |
| 4   | Afrizal, SE               | Kasi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja  | Penata Tk. I/III.d |     |

Jabatan struktural yang mengurus bidang tenaga kerja berjumlah 4 (empat) dengan 1 (satu) jabatan yang masih kosong yaitu Kasi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dikarenakan pejabat tersebut telah memasuki dunia pensiun pada bulan November 2019. Para Pejabat tersebut dibantu oleh 5 (lima) orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas di pelayanan kartu kuning (AK1) dan petugas IPK OL (Informasi Pasar Kerja Online).

Ada 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan yang mendukung capaian tujuan persentase penempatan tenaga kerja seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.25 Program dan kegiatan yang capaian sasaran penempatan tenaga kerja

| No       | Indikator Kinerja                | Program/kegiatan  | Anggaran           | Realisasi          | %            |
|----------|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>% Penempatan Tenaga Kerja</b> | <b>Program Peningkatan Kesempatan kerja</b>   | <b>261.850.000</b> | <b>258.491.675</b> | <b>98.72</b> |
|          |                                  | Keg.Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja   | 51.040.000         | 50.557.600         | 99.05        |
|          |                                  | Keg.Penyebaranluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja                                   | 49.088.050         | 48.760.325         | 99.33        |
|          |                                  | Keg. Penyiapan Tenaga Kerja siap pakai  | 76.250.000         | 74.202.350         | 97.31        |
|          |                                  | Keg. Penyelenggaraan Job Fair   | 75.200.000         | 74.705.900         | 99,34        |
|          |                                  | Keg. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan             | 10.271.950         | 10.265.500         | 99,94        |
|          |                                  | Keg. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial | 13.200.000         | 13.185.450         | 99.89        |

Adapun Rencana Tingkat Lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan persentase penempatan tenaga kerja, antara lain:

- Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja melalui event Job Fair dan Inkubasi bisnis;
- Peningkatan kompetensi pencari kerja yang sesuai dengan pasar kerja dalam maupun luar negeri melalui kegiatan pemagangan;
- Peningkatan penyebarluasan informasi lowongan kerja melalui berbagai media informasi dan mobil pelayanan keliling;
- Pemberdayaan masyarakat/pencari kerja.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran DPMPTSPNaker Kabupaten Solok pada tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaan dari APBD Tahun 2019 berjumlah Rp 1.574.594.800 terealisasi Rp. 1.560.625.154 atau dengan penyerapan sebesar 99.11%.

Tabel 3.26 Alokasi dan Realisasi Anggaran

| No | Program/Kegiatan  | Anggaran (Rp)      | Realisasi (Rp)     | %            |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------|
|    | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                           | <b>445,699,800</b> | <b>439,545,335</b> | <b>98.62</b> |
| 1  | Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 3,000,000          | 2,902,500          | 96.75        |
| 2  | Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 29,500,000         | 23,675,500         | 80.26        |
| 3  | Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 5,000,000          | 4,990,200          | 99.80        |
| 4  | Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 1,800,000          | 1,800,000          | 100.00       |
| 5  | Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 20,264,800         | 20,254,300         | 99.95        |
| 6  | Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 6,500,000          | 6,438,240          | 99.05        |
| 7  | Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor      | 5,000,000          | 4,999,000          | 99.98        |
| 8  | Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | 19,005,000         | 19,001,000         | 99.98        |
| 9  | Keg. Penyediaan makanan dan minuman   | 18,020,000         | 17,989,400         | 99.83        |
| 10 | Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                   | 228,110,000        | 228,048,395        | 99.97        |
| 11 | Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah                     | 109,500,000        | 109,446,800        | 99.95        |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur</b>                    | <b>240,715,000</b> | <b>239,312,424</b> | <b>99.42</b> |
| 12 | Keg. Pemeliharaan rutin/berkala gedung                                      |                    |                    | 96.13        |

|    |   |                      |                      |              |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|
|    | kantor  | 29,360,000           | 28,225,080           |              |
| 13 | Keg. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | 199,360,000          | 199,117,344          | 99.88        |
| 14 | Keg. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 5,000,000            | 4,975,000            | 99.50        |
| 15 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor   | 6,995,000            | 6,995,000            | 100.00       |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                         | <b>58,720,000</b>    | <b>58,448,600</b>    | <b>99.54</b> |
| 16 | Keg. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                   | 58,720,000           | 58,448,600           | 99.54        |
|    | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>  | <b>96,540,000</b>    | <b>95,765,910</b>    | <b>99.20</b> |
| 17 | Keg. Pemeliharaan R/B Sarana dan Prasarana BLK  | 96,540,000           | 95,765,910           | 99.20        |
|    | <b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>   | <b>261,850,000</b>   | <b>258,491,675</b>   | <b>98.72</b> |
| 18 | Keg. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja  | 51,040,000           | 50,557,600           | 99.05        |
| 19 | Keg. Penyebarluasan informasi bursa kerja   | 49,088,050           | 48,760,325           | 99.33        |
| 20 | Keg. Penyiapan tenaga kerja siap pakai  | 76,250,000           | 74,202,350           | 97.31        |
| 21 | Keg. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan                                       | 10,271,950           | 10,265,500           | 99.94        |
| 22 | Keg. Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja (Job Fair)   | 75,200,000           | 74,705,900           | 99.34        |
| 23 | Keg. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial                           | 13,200,000           | 13,185,450           | 99.89        |
|    | <b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>  | <b>180,615,000</b>   | <b>180,244,350</b>   | <b>99.79</b> |
| 24 | Keg. Peningkatan kordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | 121,255,000          | 121,093,550          | 99.87        |
| 25 | Keg. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan   | 59,360,000           | 59,150,800           | 99.65        |
|    | <b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>  | <b>239,080,000</b>   | <b>237,483,410</b>   | <b>99.33</b> |
| 26 | Keg. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal                              | 239,080,000          | 237,483,410          | 99.33%       |
|    | <b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Umum</b>  | <b>38,175,000</b>    | <b>38,148,000</b>    | <b>99.93</b> |
| 27 | Peningkatan Standar Mutu Manajemen  | 38,175,000           | 38,148,000           | 99.93        |
|    | <b>JUMLAH</b>   | <b>1,574,594,800</b> | <b>1,560,625,154</b> | 99.11        |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok mempunyai tugas pokok tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber daya mineral. Sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok tahun 2019 dari 4 (Empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSPNaker, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) : 3 indikator;
- b. Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 1 indikator;
- c. Capaian 56% sampai 75% (Cukup) : tidak ada indikator;
- d. Kurang dari 55% : tidak ada indikator.

Sedangkan alokasi anggaran pembiayaan program/ kegiatan untuk mewujudkan target kinerja dari APBD Kabupaten Solok Tahun 2019 sebesar Rp. 1.574.594.800 terealisasi Rp. 1.560.625.154 atau dengan penyerapan sebesar 99.11%.

#### **4.2. Saran**

Guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok, banyak hal yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Melengkapi data potensi peluang Investasi sesuai sektor dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait sesuai yang dibutuhkan dunia usaha;
- b. Penciptaan birokrasi yang efisien, jaminan kepastian hukum bidang Penanaman Modal;
- c. Menciptakan Iklim usaha yang kondusif serta kemudahan berusaha bagi calon Investor;
- d. Memberikan kemudahan Perizinan, dengan pemberian insentif dsbnya dengan tujuan untuk menarik Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Solok;

- e. Pengembangan potensi daerah melalui strategi promosi yang inovatif dengan mengikuti promosi Investasi dan potensi daerah melalui expo dan even-even yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta;
- f. Membuat Website promosi potensi peluang Investasi yang dapat diakses melalui media sosial;
- g. Mengoptimalkan Sosialisasi terhadap pemanfaatan Lokasi Investasi kepada pemilik lahan, Tokoh masyarakat setempat dengan melibatkan stakeholders pemangku kepentingan;
- h. Penambahan SDM untuk pengelolaan perizinan;
- i. Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja;
- j. Peningkatan kompetensi pencari kerja yang sesuai kebutuhan pasarkerja;
- k. Peningkatan penyebarluasan informasi lowongan kerja;
- l. Pemberdayaan masyarakat/pencari kerja melalui program dan kegiatan;
- m. Peningkatan sarana prasarana/SDM BLK;
- n. Penambahan SDM fungsional tertentu pengantar kerja serta instruktur pelatihan pada BLK;
- o. Penyediaan mobil keliling pelayanan terpadu Perizinan dan Ketenagakerjaan;
- p. Peningkatan SDM petugas melalui berbagai pelatihan teknis terkait Perizinan dan Penanaman Modal serta Ketenagakerjaan.

Arosuka, Januari 2020  
Kepala Dinas

**Drh. KENEDY HAMZAH, M.Si**  
Nip. 19650727 199202 1 002